



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2020 penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2020 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Periode 2020 - 2024. Penyusunan RENJA Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2020 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Juli 2019

KEPALA DINAS,



Drs. ISRON FADTRICAR, M.H

Pembina Utama Madya

NIP. 19591001 198708 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
II. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018.....	5
2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 S/d triwulan IV.....	5
2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2018	13
III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2020	14
3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	14
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	15
3.3 Isu-Isu Stategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	16
IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	18
4.1 Program dan Kegiatan.....	18
V. PENUTUP.....	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENJA Tahun 2018 s/d triwulan IV	5
Tabel 2.2. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2018	13
Tabel 3.1. Indikator Kinerja dan Target Sasaran Tahun 2020	16

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan program pembangunan 20 (duapuluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pembangunan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Lampung untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan RENJA ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2020 yang diselenggarakan dengan tema pembangunan nasional 2020 dan prioritas pembangunan nasional 2020 serta tema pembangunan dan Provinsi Lampung 2020 dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung 2020 dimana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung masuk pada prioritas Provinsi Lampung 2020 ke-2 yaitu Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan Untuk Mengurangi Kemiskinan Dan Ketimpangan dengan sasarannya Meningkatkan Kualitas Iklim Usaha Dan Investasi.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan 2029.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2020.

1.3.2 Maksud

Tujuan Penyusunan RENJA Tahun 2020 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2020 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Pemerintah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.4.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

1.4.2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

Bab ini memuat informasi tentang Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2018 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

1.4.3 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRA DAN KEGIATAN

Bab ini memuat analisis kebijakan nasional dan provinsi, sasaran dan tujuan serta rencana program dan kegiatan tahun 2020.

1.4.4 BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja Dinas Koperasi dan UKM, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sertacatatan dan harapan kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

II. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 s/d Triwulan IV

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja perprogram tahun 2018. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2018 dengan realisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan di tahun 2018 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

Tabel 2.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Renja Tahun 2018 s/d Triwulan IV

NO	PROGRAM	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		PREDIKAT KERJA	
		FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100	89,18	Sangat Tinggi	Tinggi
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	75,89	Sangat Tinggi	Sedang
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	73,58	Sangat Tinggi	Sedang
4	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	99,89	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	100	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100	99,33	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM	100	73,45	Sangat Tinggi	Sedang
8	Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM	100	99,14	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM	100	99,85	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	100	98,29	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	RATA-RATA JUMLAH	100	94,11	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Dari 10 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran terendah ada pada Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM sebesar 73,45 persen dari total anggaran pada program ini. Sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD 100 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan 4 tahun 2018 dapat dilihat pada uraian berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan biaya Rp. 394.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan rekening telepon, air dan listrik dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 264.209.770,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biaya Rp. 402.720.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 392.270.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 120.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 119.600.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 4. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 30.580.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan alat tulis kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 30.575.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan biaya Rp. 1.620.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 1.620.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor, dengan biaya Rp. 3.650.000,-. Indikator kinerjanya adalah

jumlah pembiayaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 3.650.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan, dengan biaya Rp. 18.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 13.140.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
8. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 14.880.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 14.880.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biaya Rp. 128.217.200,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordiansi dan konsultasi keluar daerah dengan target 18 kali. Terealisasi Rp. 128.196.978,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dengan biaya Rp. 120.104.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan target 17kali. Terealisasi Rp. 119.960.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
11. Pameran dan promosi pembangunan, dengan biaya Rp. 98.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pameran dan promosi yang di ikuti dengan target 1 even.Terealisasi Rp. 96.920.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
12. Penatausahaan barang milik daerah dengan biaya Rp. 24.900.000,- dengan target 8 dokumen. Terelealisasi Rp. 24.900.000,- dansudahdilaksanakansebanyak100persen.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 kegiatan yaitu:
 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan biaya Rp. 157.580.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 118.538.032,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan biaya Rp. 4.350.000,-. Indikatornya adalah Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 4.350.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatanyaitu :
 1. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, dengan biaya Rp. 20.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah peserta peningkatan SDM aparatur pembina KUMKM Provinsi dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 14.716.200,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 5 kegiatanyaitu :
 1. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp.87.551.500,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah laporan keuangan dengan target 13 dokumen. Terealisasi Rp. 87.535.500,- dan sudah dilaksanakan sebanyak100persen.
 2. Penyusunan data kepegawaian, dengan biayaRp. 172.200.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan data kepegawaian target 12 bulan. TerealisasiRp. 172.200.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 3. Penyusunan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 100.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen laporan capaian

kinerja dengan target 11 dokumen. Terealisasi Rp. 99.475.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.

4. Peningkatan data dan informasi, dengan biaya Rp. 39.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan data dan informasi dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 39.000.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 5. Monev dan sinkronisasi program dengan biaya Rp. 77.284.282,- dengan target 8 kali. Terealisasi Rp. 77.284.282,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan 1 kegiatanyaitu :
1. Penyelenggaraan musrenbang SKPD dengan biaya Rp. 80.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pelaksanaan musrenbang dengan target 1 kali. Terealisasi Rp. 80.000.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
- 6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM dengan 11 kegiatanyaitu :
1. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS dengan biaya Rp. 60.000.000,-. Indikatornya adalah jumlah penilaian terhadap koperasi di Kabupaten/Kota dengan target 30 koperasi. Terealisasi Rp. 59.956.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 2. Transplantasi untuk 10 kumkm dalam rangka pembinaan keluar provinsi dengan biaya Rp. 75.000.000,- dengan target 6 UKM. Terealisasi Rp. 75.000.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 3. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah dengan biaya Rp. 625.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Pengembangan dan promosi Produk-produk unggulan daerah adalah 5 kali. Terealisasi Rp. 619.542.090,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.

4. Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi umkm dengan biaya Rp. 75.176.000,- dengan target 10 umk. Terealisasi Rp. 75.175.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 5. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan biaya Rp. 43.350.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Pengembangan Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan target 30 orang. Terealisasi Rp. 43.350.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 6. Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi dengan biaya Rp. 70.176.250,- dengan target 30 koperasi. Terealisasi Rp. 70.146.250,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 7. Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi dengan biaya Rp. 119.950.000,- dengan target 30 koperasi. Terealisasi Rp. 111.332.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 8. Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikaan dan perkulakan dengan biaya Rp. 50.000.000,- dengan target 15 koperasi. Terealisasi Rp. 49.542.100,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 9. Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM dengan biaya Rp. 119.915.000,- dengan target 180 KUMKM. Terealisasi Rp. 119.875.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 10. Peningkatan akses pasar produk koperasi dalam dan luar negeri dengan biaya Rp. 50.000.000,- dengan target 5 koperasi. Terealisasi Rp. 49.542.100,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 11. Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah dengan biaya Rp. 60.000.000,- dengan target 1 perusahaan. Terealisasi Rp. 58.025.864,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
- 7) Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKM dengan kegiatan yaitu :
1. Peningkatan pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 672.229.302,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah pembiayaan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 485.983.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.

2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, dengan biaya Rp. 30.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah UMKM yang termonitoring dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD dengan target 12 kali. Terealisasi Rp. 29.791.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
- 8) Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM dengan 1 kegiatan yaitu :
1. Peningkatan jenis usaha koperasi dengan biaya Rp. 50.000.000,- dengan target 17 koperasi. Terealisasi Rp. 49.570.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
- 9) Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan 2 kegiatan yaitu :
1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan biaya Rp. 2.000.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM dengan target 495 orang. Terealisasi Rp. 1.996.821.400,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 2. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi dengan biaya Rp. 74.194.000,- dengan target 6 koperasi. Terealisasi Rp. 74.184.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
- 10) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan 6 kegiatan yaitu :
1. Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi, dengan Biaya Rp. 147.340.900,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi dengan target 1 even. Terealisasi Rp. 145.398.300,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
 2. Koordinasi kelembagaan dan updating data keragaan koperasi, dengan biaya Rp. 49.514.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah

koordinasi kelembagan dan updating data keragaan koperasi dengan target 15 kali. Terealisasi Rp. 49.514.600,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.

3. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi dan UMKM, dengan biaya Rp. 41.288.000,-
Indikator kinerjanya adalah jumlah monitoring dan evaluasi dengan target 3kali. Terealisasi Rp. 39.036.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
4. Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi dengan biaya Rp. 75.000.000,- dengan target 35 koperasi. Terealisasi Rp. 74.340.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
5. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dengan biaya Rp. 70.000.000,-
Indikator kinerjanya adalah jumlah pembinaan dan pengawasan koperasi target 40 koperasi. Terealisasi Rp. 69.684.000,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.
6. Pembinaan dan monitoring terhadap koperasi dengan biaya Rp. 140.816.250,- dengan target 53 koperasi. Terealisasi Rp. 137.020.425,- dan sudah dilaksanakan sebanyak 100 persen.

2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2018

Capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2018 s/d Triwulan IV

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2018	REALISASI	Tingkat Capaian (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung	1. Meningkatkan jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1. Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif	78 %	81,83 %	104,91 %
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1. Persentase pertumbuhan wirausaha baru	77 %	79,69 %	109,49 %
		3. Meningkatkan standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	3. Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten	75 %	75 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah cukup baik dimana dari ke tiga indikator sudah cukup memenuhi harapan dimana persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif yang ditargetkan naik sebesar 78 persen tercapai sebesar 81,83 persen, persentase pertumbuhan wirausaha baru dari target 77 persen telah tercapai sebesar 79,69 persen dan Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI, dan paten dari target 75 persen telah tercapai 75 persen. Hal ini menandakan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam mencapai sasaran utama dinas telah tercapai bahkan ada yang melebihi target.

III. TUJUAN DAN SASARANTAHUN 2020

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan kedepan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Guna mewujudkan kesinambungan pembangunan, pemerintah telah merancang prioritas pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2020 mendatang. Oleh karenanya, Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggungjawab untuk mendukung suksesnya pencapaian prioritas nasional yaitu :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Peletarian Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Sejalan dengan Prioritas Nasional dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Tema Pembangunan Tahun 2020 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan”**.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan pembangunan, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang 6 (enam) Prioritas Pembangunan dimana terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, masuk dalam mengemban Prioritas Pembangunan ke-2 (dua) yaitu **“Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan untuk Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan”**. Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2020.

1. Pembangunan SDM dengan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Kaum Difabel dan Perlindungan Anak
2. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan untuk Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan
3. Reformasi Birokrasi
4. Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
5. Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif
6. Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2020-2024, ada 1 (satu) tujuan yang akan di capai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu **“Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi”**

Sedangkan Sasaran Utama Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang akan di lakukan pada tahun 2020 yaitu:

1. Meningkatnya Tatakelola Organisasi dan Kinerja Koperasi Yang Profesional dan Akuntabel
2. Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh Dan Mandiri

Selengkapnya indikator kinerja dan target sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2020	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2020		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase pertumbuhan Koperasi Aktif (%)	4,4	1. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	1	Persentase Koperasi yang Aktif (%)	47,27
						2	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikasi Kompetensi (%)	30
		2	Persentase Pertumbuhan Jumlah UMKM (%)	2,0	1. Meningkatkan wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1	Penumbuhan Wirausaha Baru (WP)	150
						2	Perkembangan umkm yang meningkat akses permodalan, pemasaran produk, dan kualitas Sdmnya (UMKM)	680

3.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan utama terkait dengan Pengelolaan Koperasi dan UMKM adalah Rendahnya Daya Saing Koperasi dan UMKM serta Iklim Usaha yang Belum Kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Selain itu beberapa masalah lain seperti rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak pada kinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupun moderen, kualitas produk hasil UMKM masih rendah, lemahnya akses dan penguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produk hasil UKM, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usaha maupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi juga mempengaruhi kinerja Koperasi dan UMKM. Berdasarkan uraian dan

permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat disarikan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya koperasi tidak aktif.
2. Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi, dan UKM.
3. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestic dan global.
4. Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UKM.
5. Lemahnya akses bagi KUKM pada sumberdaya produktif (pembiayaan dan penjaminan).
6. Lemahnya daya saing sumberdaya manusia pada KUKM.
7. Belum optimalnya penyerapan lapangan kerja disektor Koperasi dan UKM.
8. Masih rendahnya inovasi dan keterampilan sdm (pelaku) dalam pengembangan UKM.
9. Rendahnya kapasitas lembaga pelayanan permodalan dalam menunjang kinerja UKM.
10. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparaturnya Koperasi dan UKM.

IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

4.1 Program dan Kegiatan

Jumlah pagu pada RENJA tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) terdiri dari 11 (sebelas) program dan 60 (enam puluh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran Rp. 1.435.000.000,- terdiri dari 11 kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 350.000.000,- dengan target 100 persen
 - 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 275.000.000,- dengan target 100 persen
 - 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 140.000.000,- dengan target 100 persen
 - 4) Penyediaan alat tulis kantor Rp. 29.000.000,- dengan target 30 buah
 - 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 30.000.000,- dengan target 15.000 lembar
 - 6) Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik Rp. 15.000.000,- dengan target 3 buah
 - 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 20.000.000,- dengan target 750 buah
 - 8) Penyediaan makanan dan minnumam Rp. 30.000.000,- dengan target 15kali
 - 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Rp. 200.000.000,- dengan target 20 kali
 - 10) Penyedia jasa keamanan kantor Rp. 116.000.000,- target 8 orang
 - 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Rp 230.000.000 target 8 orang

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 350.000.000,- terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 50.000.000,- dengan target 4 unit
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 50.000.000,- dengan target 1 unit
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 200.000.000,- dengan target 10 unit
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 50.000.000,- dengan target 20 unit

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Rp. 140.000.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur Rp. 15.000.000,- target 100 persen
 - 2) Peningkatan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi publik Rp. 50.000.000,- target 100 persen
 - 3) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 75.000.000,- target 134 stel

4. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah Rp. 600.000.000,- terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja Rp. 100.000.000,- dengan target 11 dokumen
 - 2) Penyusunan laporan capaian keuangan Rp. 30.000.000,- target 17 dokumen
 - 3) Penyusunan dokumen perencanaan Rp. 200.000.000,- target 13 dokumen
 - 4) Penyusunan data dan informasi melalui website, media sosial dan pemeran pembangunan Rp. 120.000.000,- target 1 even
 - 5) Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan aset Rp. 150.000.000,- target 4 dokumen

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp. 300.000.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi kelembagaan dan Up-dating data keragaan koperasi Rp. 75.000.000,- dengan target jumlah Peserta koordinasi kelembagaan dan Up-dating data keragaan koperasi sebanyak 30 orang
 - 2) Peningkatan Kualitas tatalaksana perizinan koperasi Rp. 75.000.000,- dengan target jumlah Koperasi yang Meningkatkan kualitas Tatalaksana Perizinannya sebanyak 30 koperasi
 - 3) Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi Rp. 150.000.000,- dengan target jumlah koperasi berprestasi sebanyak 15 koperasi

6. Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Bagi Koperasi Rp. 275.000.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Peningkatan kualitas dan fasilitas usaha bagi koperasi Rp. 115.000.000,- dengan target jumlah koperasi yang meningkat kualitas dan fasilitas usahanya sebanyak 30 koperasi
 - 2) Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha bagi koperasi Rp. 80.000.000,- dengan target jumlah koperasi yang berkembang dan terlindungi usahanya sebanyak 30 koperasi
 - 3) Peningkatan kualitas sdm koperasi Rp. 80.000.000,- dengan target jumlah koperasi yang ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya sebanyak 60 orang

7. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 250.000.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengawasan penerapan aturan perkoperasian dan pemberian sanksi Rp. 75.000.000,- dengan target jumlah koperasi yang di bina dan diawasi penerapan peraturan perkoperasiannya sebanyak 25 koperasi
 - 2) Penilaian kesehatan koperasi Rp. 100.000.000,- dengan target jumlah koperasi yang di nilai kesehatannya sebanyak 40 koperasi

- 3) Pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi Rp. 75.000.000,- dengan target jumlah koperasi yang di awasi dan diperiksa kelembagaan dan usahanya sebanyak 30 koperasi
8. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM Rp. 3.175.000.000,- terdiri dari 4 kegiatan yaitu :
 - 1) Peningkatan fasilitas layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM Rp. 25.000.000,- dengan target jumlah pembiayaan peningkatan fasilitas layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM sebanyak 12 bulan
 - 2) Pelatihan kewirausahaan Rp. 100.000.000,- dengan target jumlah peserta pelatihan kewirausahaan sebanyak 60 orang
 - 3) Pelatihan Vocasional Rp. 115.000.000,- dengan target jumlah peserta pelatihan vocational sebanyak 30 orang
 - 4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM Rp. 3.000.000.000,- dengan target jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM sebanyak 780 orang
 - 5) Monitoring dan evaluasi pengembangan sdm kopersi dan umkm Rp. 50.000.000,- dengan target jumlah monitoring dan evaluasi pengembangan sdm kopersi dan umkm sebanyak 15 kali
 9. Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rp. 425.000.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Pendataan dan pembinaan UMKM Rp. 100.000.000,- dengan terget jumlah sinkronisasi data umkm dan jumlah umkm yang dibina sebanyak 50 UMKM
 - 2) Pembinaan kelompok usaha pemula Rp. 100.000.000,- dengan target 2 kelompok usaha pemula yang dibina
 - 3) Pengembangan dan Promosi Produk-produk Unggulan Daerah Rp. 225.000.000,- dengan terget jumlah peserta pameran dan promosi produk-produk UMKM sebanyak 6 UMKM

10. Program Peningkatan Pembiayaan Usaha Bagi Koperasi dan Rp. 750.000.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
- 1) Evaluasi kinerja uptd Rp. 50.000.000,- dengan target jumlah laporan evaluasi kinerja uptd sebanyak 1 laporan
 - 2) Pendampingan usaha bagi calon/penerima dana bergulir Rp. 100.000.000,- dengan target jumlah calon/penerima dana bergulir yang didampingi usahanya sebanyak 80 KUMKM
 - 3) Peningkatan pelayanan Pembiayaan terhadap KUMKM Rp. 600.000.000,- dengan target persentase peningkatan kinerja layanan pembiayaan bagi kumkm sebesar 100 persen
11. Program Layanan Usaha Terpadu Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Rp. 300.000.000,- yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
- 1) Peningkatan kinerja layanan PLUT Rp. 75.000.000,- dengan target jumlah pembiayaan peningkatan kinerja layanan PLUT sebanyak 12 bulan
 - 2) Pengembangan Jaringan Usaha dan pemasaran bagi KUMKM mitra binaan PLUT Rp. 100.000.000,- dengan target Jumlah KUMKM yang berkembang Jaringan usahanya (melalui peningkatan Kualitas produknya, pengembangan akses pemasaran dan promosinya) dengan mengikuti Pameran/Bazar /Promosi Produk KUMKM dan juga melakukan pemasaran produk secara e-commerce sebanyak 60 KUMKM
 - 3) Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM mitra binaan PLUT Rp. 125.000.000,- Jumlah KUMKM yang meningkat skala usahanya dengan melakukan Temu usaha, pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan secara online/offline, pengurusan SIUMK dan PIRT sebanyak 60 KUMKM

V. PENUTUP

PenyusunanRENJA Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM. Keberhasilan pelaksanaanRENJA Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung di tentukan oleh dukungan dari seluruh pegawai dan pelaku usaha Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnyaRENJA Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi dan UKM ditandai dengan target capaian kinerja dalam tahun 2020 telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat di ukur dan dinilai keberhasilannya.

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UKKM
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2020				KETERANGAN
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2 11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
2 11 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
2.11.1.1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				8.000.000.000		
2.11.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran			1.435.000.000		
2.11.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor OPD	100 %	350.000.000	PAD	
2.11.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Kantor OPD	100 %	275.000.000	PAD	
2.11.1.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan Kebersihan Kantor	Kantor OPD	100 %	140.000.000	PAD	
2.11.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	Kantor OPD	30 Buah	29.000.000	PAD	
2.11.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor OPD	150000 Lembar	30.000.000	PAD	
2.11.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Kantor OPD	3 Buah	15.000.000	PAD	
2.11.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor OPD	750 Buah	20.000.000	PAD	
2.11.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makan Minum	Kantor OPD	15 Kali	30.000.000	PAD	
2.11.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	Dalam dan Luar Provinsi	20 Kali	200.000.000	PAD	
2.11.1.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	Kantor OPD	8 orang	116.000.000	PAD	

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2020				KETERANGAN
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	Kantor OPD	8 orang	230.000.000	PAD	
2.11.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor			350.000.000		
2.11.1.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor OPD	4 unit	50.000.000	PAD	
2.11.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kantor OPD	1 unit	50.000.000	PAD	
2.11.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kantor OPD	10 unit	200.000.000	PAD	
2.11.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor OPD	20 unit	50.000.000	PAD	
2.11.1.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah			140.000.000		
2.11.1.1.3.2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Persentase Capaian Kinerja dan Kehadiran Bulanan	Kantor OPD	100 %	15.000.000	PAD	
2.11.1.1.3.3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Pelayanan Informasi Publik	Kantor OPD	100 %	50.000.000	PAD	
2.11.1.1.3.4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kantor OPD	134 Stel	75.000.000	PAD	
2.11.1.1.4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan			600.000.000		
2.11.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Kantor OPD	11 dokumen	100.000.000	PAD	
2.11.1.1.4.2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan OPD	Kantor OPD	17 dokumen	30.000.000	PAD	
2.11.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kantor OPD	13 dokumen	200.000.000	PAD	
2.11.1.1.4.4	Penyusunan Data dan Informasi melalui Website, Media Sosial dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	Kantor OPD	1 Event	120.000.000	PAD	

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2020				KETERANGAN
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.1.1.4.5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Kantor OPD	4 dokumen	150.000.000	PAD	
2.11.1.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi yang melakukan RAT			300.000.000		
2.11.1.1.18.1	Koordinasi Kelembagaan dan up-dating Data Keragaan Koperasi	Jumlah Peserta Koordinasi Kelembagaan dan Up- Dating Data Keragaan Koperasi	Provinsi Lampung	30 orang	75.000.000	PAD	
2.11.1.1.18.2	Peningkatan Kualitas Tatalaksana Perizinan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Tatalaksana Perizinannya	Provinsi Lampung	30 orang	75.000.000	PAD	
2.11.1.1.18.4	Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah Koperasi yang Berprestasi	Provinsi Lampung	15 Koperasi	150.000.000	PAD	
2.11.1.1.20	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Daya Saing Usahanya dari sisi Permodalan, Pemasaran dan Jaringan Usaha			275.000.000		
2.11.1.1.20.1	Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas dan Fasilitas Usahanya	Provinsi Lampung	30 Koperasi	115.000.000	PAD	
2.11.1.1.20.2	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Berkembang dan Terlindungi usahanya	Provinsi Lampung	30 Koperasi	80.000.000	PAD	
2.11.1.1.20.3	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang ditingkatkan Kemampuan dan Pengetahuannya	Provinsi Lampung	60 orang	80.000.000	PAD	
2.11.1.1.21	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pelanggaran peraturan perkoperasian yang ditindak lanjuti (%)			250.000.000		
2.11.1.1.21.1	Pengawasan penerapan aturan perkoperasian dan pemberian sanksi	Jumlah koperasi yang dibina dan diawasi Penerapan Peraturan Perkoperasiannya	Provinsi Lampung	25 Koperasi	75.000.000	PAD	
2.11.1.1.21.2	Penilaian kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	Provinsi Lampung	40 Koperasi	100.000.000	PAD	
2.11.1.1.21.3	Pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa Kelembagaan dan Usahanya	Provinsi Lampung	30 Koperasi	75.000.000	PAD	
2.11.1.1.22	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Persentase Jumlah Koperasi dan UMKM yang Bersertifikasi			3.175.000.000		

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2020				KETERANGAN
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.1.1.22.1	Peningkatan fasilitas layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	Jumlah Pembiayaan Peningkatan Fasilitas Layanan UPTD Badiklatkop dan UMKM	Provinsi Lampung	12 bulan	25.000.000	PAD	
2.11.1.1.22.4	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	Provinsi Lampung	60 orang	100.000.000	PAD	
2.11.1.1.22.8	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM	Provinsi Lampung	780 orang	3.000.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)	
2.11.1.1.22.9	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Provinsi Lampung	15 Kali	50.000.000	PAD	
2.11.1.1.23	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat Daya Saing Usahanya (UMKM)			425.000.000		
2.11.1.1.23.3	Pendataan dan Pembinaan UMKM	Jumlah Sinkronisasi Data UMKM dan Jumlah UMKM yang dibina	Provinsi Lampung	50 UMKM	100.000.000	PAD	
2.11.1.1.23.7	Pembinaan Kelompok Usaha Pemula	Jumlah Kelompok Wirausaha Pemula yang dibina	Provinsi Lampung	2 Kelompok	100.000.000	PAD	
2.11.1.1.23.8	Pengembangan dan Promosi Produk-Produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta Pameran dan Promosi Produk- produk UMKM	Provinsi Lampung	6 UMKM	225.000.000	PAD	
2.11.1.1.24	Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat Fasilitas Pembiayaan Dana Bergulir			750.000.000		
2.11.1.1.24.2	Evaluasi Kinerja UPTD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja UPTD	Provinsi Lampung	1 Laporan	50.000.000	PAD	
2.11.1.1.24.4	Pendampingan Usaha bagi Calon/ Penerima Dana Bergulir	Jumlah Calon/ Penerima Dana Bergulir yang didampingi Usahanya	Provinsi Lampung	80 KUMKM	100.000.000	PAD	
2.11.1.1.24.5	Peningkatan Pelayanan Pembiayaan terhadap KUMKM	Persentase Peningkatan Layanan Pembiayaan bagi KUMKM	Provinsi Lampung	100 %	600.000.000	PAD	
2.11.1.1.25	Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pendampingan dan Pelayanan oleh UPTD PLUT KUMKM			300.000.000		

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2020				KETERANGAN
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.1.1.25.1	Peningkatan Kinerja Layanan PLUT	Jumlah Pembiayaan Peningkatan Kinerja Layanan PLUT	Provinsi Lampung	12 bulan	75.000.000	PAD	
2.11.1.1.25.2	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	Jumlah KUMKM yang berkembang (Kualitas Produknya, Akses Pemasarannya, Jaringan Usaha dan Promosinya) dengan mengikuti Pameran/Bazar/Promosi Produk KUMKM dan Melakukan dan Melakukan Pemasaran Produk secara e- commerce	Provinsi Lampung	60 KUMKM	100.000.000	PAD	
2.11.1.1.25.3	Peningkatan Layanan Usaha bagi KUMKM Mitra Binaan PLUT	Jumlah KUMKM yang Meningkatkan Skala Usahanya dengan melakukan Temu Usaha, Pendampingan dalam Pembuatan Laporan Keuangan secara Online/Offline, Pengurusan SIUMK dan PIRT	Provinsi Lampung	60 KUMKM	125.000.000	PAD	
TOTAL PAGU TAHUN 2020					8.000.000.000		